

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kemunculannya konflik terkadang bersifat positif (*constructive*) atau bahkan bersifat negatif (*destructive*). Adanya fenomena bahwa konflik terkadang bersifat positif, melatarbelakangi munculnya asumsi bahwa konflik semestinya dikelola dengan baik agar berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu adanya asumsi bahwa konflik tidak dapat dicegah melainkan dapat diatur mekanisme pengelolaan konflik sehingga dapat menghindari terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Konflik berkepanjangan umumnya terjadi di negara-negara berkembang, seperti halnya negara-negara di Afrika. Bagi kawasan Afrika konflik telah menjadi hal yang lazim. Hampir setiap negara di Afrika pernah mengalami konflik horisontal dalam internal negaranya. Konflik tersebut umumnya berlangsung lama dan menelan banyak korban jiwa sehingga berimplikasi terhadap keterbelakangan masyarakatnya. Beragamnya suku yang mendiami suatu wilayah yang sama rentan akan isu perpecahan di antara mereka. Seperti halnya konflik yang terjadi di kawasan Darfur dalam wilayah negara Sudan bagian barat ini.

Selain masuk dalam kawasan Afrika, negara Sudan termasuk negara kawasan arab pinggiran<sup>1</sup> yang didiami suku Arab keturunan Afrika. Suku utama yang mendiami wilayah Darfur ini adalah suku Afrika Hitam dengan dominasi etnis Fur dan sebagian kecil suku Afrika Arab yang merupakan pendatang. Masih besarnya identitas kesukuan dalam setiap aktifitas kehidupan di Sudan dan masalah perebutan sumber daya alam menjadi pemicu awal perselisihan di kawasan Sudan Barat ini. Namun kemudian konflik ini berkembang hingga melibatkan pemerintah pusat Sudan yang dituduh kurang membangun kawasan Darfur yang kaya sumber daya alamnya. Konflik kian meruncing ketika makin banyak pihak-pihak internasional yang terlibat di dalamnya. Meski beragam perundingan damai terus diupayakan untuk meredam konflik yang telah meletus sejak tahun 2003, namun angin perdamaian belum juga berembus di kawasan Darfur. Hal inilah yang mendasari penulis membahas mengenai **“Dinamika Manajemen Konflik Darfur di Sudan : 2003-2010”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konflik yang terjadi di Sudan, terutama konflik yang terjadi di Darfur (Sudan Barat) pada masa pemerintahan Omar Hassan Bashir.
2. Mengetahui tahapan konflik menuju eskalasi pada konflik Darfur dari tahun 2003 hingga 2010.

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, *Politik Timur Tengah : Bahan Ajar Perkuliahan Politik & Pemerintahan Timur Tengah* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004) hal.121

3. Mengetahui manajemen konflik yang digunakan pemerintah Omar Hassan Bashir dalam menangani konflik Darfur.

### C. Latarbelakang Masalah

Darfur adalah wilayah Sudan bagian barat di mana beberapa kelompok etnis mendominasi daerah ini dan beragama islam. Populasi di Darfur terdiri dari beberapa suku yang semuanya bekerja sebagai petani dan pengembala unta serta sapi. Mayoritas suku yang bekerja sebagai petani adalah suku Fur dan Masalit, dan mayoritas suku yang bekerja sebagai pengembala adalah suku Zaghawa, Baqqaram dan Abbala.<sup>2</sup> Keberagaman etnis dan ikatan primordial di wilayah Darfur ini membentuk kelompok-kelompok pemberontak yang berujung pada konflik etnis.

Negara Sudan seperti kebanyakan negara di kawasan Afrika lainnya memiliki karakteristik rentan terhadap masalah perebutan kekuasaan dari pemerintah sipil oleh pihak militer (kudeta) dan kerap kali terjadi konflik saudara antar etnis. Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956 sejarah Sudan terus diwarnai konflik politik dan etnis antara pemerintah, kelompok oposisi serta kalangan pemberontak. Situasi tersebut menyebabkan pembangunan daerah-daerah di kawasan Sudan tersendat dan upaya perdamaian nasional menjadi terhambat. Didorong oleh situasi yang nyaris membawa kehancuran Brigjen Omar

---

<sup>2</sup> *Peranan Uni Afrika dalam Mengelola Konflik Darfur di Sudan 2005-2007*,  
<http://felixsharieff.wordpress.com/2010/04/05/peranan-uni-afrika-dalam-mengelola-konflik-darfur-di-sudan-2005-2007/>, diakses 14 Oktober 2010

Hassan Ahmad Al Bashir dengan dukungan beberapa perwira serta p  
*National Islamic Front* (NIF) pimpinan Hassan Abdullah Turabi, melanca  
kudeta tak berdarah pada tanggal 30 Juni 1989 dari pemerintahan koalisi F  
Persatuan Demokrasi/ *Democratic Unionis Party* (DUP) dan Partai Umma/ *U*  
*Party*. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Revolusi *Al Inqaz Al Wa*  
atau Revolusi Penyelamat Nasional.<sup>3</sup>

Sejak memerintah Sudan Presiden Omar Hassan Bashir juga dihad  
pada berbagai permasalahan yang hampir sama dengan pemerintahan sebelu  
Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa hal yaitu; pertama, kondisi p  
yang cukup panas yang rawan oleh kudeta. Kedua, kondisi keamanan di  
konflik berkepanjangan dengan pemberontak Selatan (SPLM/A) dan g  
konflik laten sering mengganggu instabilitas politik dan keamanan negara in  
yang terakhir adalah kondisi perekonomian Sudan yang sampai sekarang  
bisa dikatakan stabil dikarenakan gejolak konflik berkepanjangan serta  
kering yang melanda negara ini.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang paling menyita perhatian Pemerintah Omar  
Bashir dalam gejolak sosial dan politik negaranya adalah konflik etnis ber  
agama yang melanda kawasan Sudan Selatan. Konflik yang telah terjadi  
21 tahun ini terjadi antara masyarakat Selatan yang beretnis Afrika  
beragama kristen berperang melawan Pemerintah Sudan yang mayoritas  
Arab beragama islam di Utara. Perang antara keduanya terjadi selama b

---

<sup>3</sup> *Dinamika Perpolitikan di Sudan*, [http://pks-sudan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51&Itemid=71](http://pks-sudan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=71), diakses 1  
Oktober 2010

<sup>4</sup> Tomih Bramantyo, *Manajemen Konflik Pemerintah Omar Hasan Ahmad Al Bashir Dal*

tahun hingga akhirnya pada 9 Januari 2005 disepakati perjanjian damai dalam *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang menandai berakhirnya ketegangan Utara-Selatan. CPA ini membuahkan suatu referendum penentuan nasib sendiri yang akan diselenggarakan pada Januari 2011. Maka dengan disepakatinya perjanjian damai Utara-Selatan tersebut menunjukkan perhatian dan keseriusan Pemerintah Sudan dalam mengatasi konflik internalnya ke arah yang positif.

Konflik lain di Sudan yang membutuhkan penanganan serius dan telah menarik perhatian masyarakat internasional adalah konflik Darfur yang terjadi di Sudan bagian barat. Perebutan atas sumber-sumber daya alam dan masalah pembangunan menjadi pemicu meletusnya konflik di wilayah Darfur mulai 2003. Konflik yang awalnya terjadi antar suku ini berkembang menjadi konflik pemberontak etnis Afrika Hitam dengan Pemerintah Sudan. Konflik terjadi karena Pemerintah Sudan dituduh kurang membangun wilayah Darfur yang menyebabkan pembangunan sosial, politik dan ekonomi wilayah tersebut rendah dibanding wilayah Sudan lainnya. Padahal Darfur merupakan kawasan yang kaya sumber minyak, uranium dan gas. Pemberontak etnis Afrika Hitam ini, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak atau *Justice and Equality Movement (JEM)* dan Tentara Pembebasan Sudan atau *Sudanese Liberation Army (SLA)*, mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi etnis Afrika Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Bentrokan Tewaskan 41 Orang* (diakses 12 oktober 2010);  
[http://internasional.kompas.com/read/2010/06/07/05452623/Bentrokan\\_Tewaskan\\_41\\_Orang](http://internasional.kompas.com/read/2010/06/07/05452623/Bentrokan_Tewaskan_41_Orang)

Wilayah Darfur seluas 493.180 km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari wilayah Sudan<sup>6</sup>, memiliki iklim yang ekstrim menyulut api perselisihan antar etnis di wilayah tersebut. Hal tersebut menjadikan suku/ etnis di Sudan Barat ini harus berbagi cadangan air dan tanah untuk pertanian dan peternakan mereka. Pada awal tahun 1980-an terjadi kekeringan panjang yang menyebabkan ketidakseimbangan di Darfur. Di tahun yang sama terjadi perang antara Libya dan Chad yang mempengaruhi penyebaran ideologi supremasi Arab ke Darfur. Keterlibatan Libya juga mengakibatkan masuknya arus senjata kecil ke Darfur yang pada akhirnya menyebabkan tindak kekerasan. Pada pertengahan 1987 perang pecah antara etnis Fur dan nomaden Arab. Dalam perperangan saat itu tentara Sudan memberikan persenjataan dan kuda pada kelompok nomaden Arab yang kemudian disebut sebagai kaum Janjaweed/ milisi Arab. Dengan diabaikannya situasi tersebut oleh pemerintah Sudan, perang di wilayah Darfur kian meruncing.

Semenjak Sudan memperoleh kemerdekaannya, Darfur secara politik dan ekonomi terabaikan oleh Pemerintah Sudan. Sejumlah kaum terpelajar Darfur membentuk suatu pergerakan politik di tahun 1960-an untuk memperjuangkan Darfur agar sejajar dengan wilayah lain. Akhirnya pada akhir tahun 1980-an suku-suku petani di sana seperti Fur dan Masalit menghadapi konflik tidak hanya dengan suku Arab (Baqqaram) namun juga dengan pemerintah Sudan. Sebagai akibatnya, suku-suku Afrika (Fur, Masalit, dan Zaghawa) ini membentuk kelompok perlawanan bersenjata di akhir tahun 1990-an dan di tahun 2001

---

<sup>6</sup> Ariel L., Percy Julian Middle School, *Sudan's Geography*,

mereka melancarkan serangan sporadis terhadap gedung-gedung kepolisian dan markas tentara. Pada tahun 2002, ketiga suku ini memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontakan yaitu Pasukan Pembebasan Sudan atau *Sudanese Liberation Army* (SLA) atau *Jaisy Tahrir al-Sudan* dan Gerakan Keadilan Persamaan atau *Justice and Equality Movement* (JEM) atau *Jaisy Tahrir al-Sudan*. Pada Februari 2003 terjadi serangan terhadap Bandar Udara El Fasher di Darfur Utara oleh para pemberontak Darfur yang dinilai sebagai titik dimulainya perang di wilayah Darfur hingga kini.

Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintahan Omar Hassan Bashir terhadap konflik Darfur tidak lepas dari pengaruh pengalaman sejarah pembuatan kebijakan pendahulunya dan karakteristik aktor yang dilibatkan dalam menangani konflik tersebut. Seperti kebijakan pemerintahan terdahulunya yaitu pemerintahan Numeiri (awal 1980-an) dan pemerintahan Sadiq Al Mahdi (1986-1989), dalam melakukan manajemen konflik pemerintah Bashir membentuk serta memanfaatkan sejumlah milisi bersenjata guna meredam konflik yang terjadi baik terhadap pemberontak SPLA di Sudan Selatan maupun pemberontak Darfur. Karakteristik lain yang diterapkan pemerintah Bashir seperti kebijakan pendahulunya adalah dengan melibatkan pihak pemerintah, milisi bersenjata dan militer sebagai aktor peredam konflik. Keterlibatan pemerintah Bashir sebagai salah satu aktor dalam konflik Darfur menggambarkan bagaimana konflik ini mulai mengarah pada konflik politik, di mana isu diskriminasi ras yang awalnya diusung mulai meluas hingga memunculkan tuntutan kekuasaan atas politik

Terkait kebijakan manajemen konflik yang dilakukan pemerintah Bashir atas konflik Darfur, PBB memperkirakan sekitar 300.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta lainnya meninggalkan rumah mereka, sejak pemberontakan di Darfur meningkat terhadap pemerintah Khartoum (Sudan), yang dibantu oleh milisi Arab setempat, pada Februari 2003.<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan tuduhan telah terjadi masalah kemanusiaan seperti genosida yang dilontarkan beberapa pihak internasional atas konflik di Darfur tersebut.

Kondisi ini memaksa komunitas regional maupun internasional ikut andil dalam penyelesaian konflik Darfur. Pada tahun 2004 Uni Afrika menggelar misi pemeliharaan perdamaian dengan nama AMIS (*African Mission In Sudan*). Dalam suatu perundingan di Abuja, Nigeria pada Desember 2005, pihak pemberontak SLA dan JEM menuntut agar pemerintah memberikan jabatan asisten dan penasihat presiden kepada kelompok SLA dan JEM, membentuk Dewan Daerah Darfur, pengangkatan dari wakil Darfur dalam pemerintahan administratif Sudan dengan jatah 50:50. Pemerintah Sudan menolak hal tersebut dan tetap berkeinginan agar masalah tersebut didiskusikan kembali dengan tetap mengacu pada persetujuan damai. Namun beberapa kali perundingan damai yang diselenggarakan selalu gagal mencapai kesepakatan damai.

Barulah pada tanggal 5 Mei 2006 di Abuja, Nigeria diadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai, yang dinamakan *Darfur Peace Agreement* (DPA). Kesepakatan damai tersebut ditandatangani Pemerintah Sudan dengan

---

<sup>7</sup> PBB *Kecam Serangan di Darfur*,  
[http://internasional.kompas.com/read/2010/05/08/10334394/PBB\\_Kecam\\_Serangan\\_di\\_Darfur](http://internasional.kompas.com/read/2010/05/08/10334394/PBB_Kecam_Serangan_di_Darfur)

SLA Minni Minawi, sedangkan JEM dan SLA Abdul Wahid menolak menandatangani. Hal tersebut mengakibatkan situasi di lapangan masih sangat rapuh karena JEM merupakan faksi pemberontak terbesar dan terkuat, sementara SLA Abdul Wahid mempunyai pengaruh yang kuat karena merupakan representasi suku Fur dan menguasai beberapa wilayah di Darfur.<sup>8</sup>

Menyikapi masalah Darfur yang belum juga membaik maka sejak 2008 ditempatkan UNAMID (*United Nations-African Union Mission In Darfur*) untuk memantau kawasan Darfur. UNAMID adalah misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika di wilayah Darfur yang menghadapi kesulitan di bagian barat Sudan, yang terdiri atas 21.800 personel berseragam.<sup>9</sup>

Konflik di lapangan terus terjadi antara pemberontak Darfur, khususnya fraksi-fraksi yang tidak menandatangani DPA, dengan tentara pemerintah. Akibat konflik tersebut rakyat yang menjadi korban semakin menderita, karena terjadi penghancuran terhadap rumah-rumah penduduk, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan warga sipil. Akibatnya banyak rakyat yang meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman baik dalam wilayah Sudan maupun ke luar negeri.

Perubahan eskalasi konflik ke arah krisis dan berlanjut pada terjadinya krisis kemanusiaan yang dituduhkan dunia internasional menjadi salah satu efek

---

<sup>8</sup> *Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia*,  
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=200&halaman=5>, diakses 14 Oktober 2010

<sup>9</sup> *Rwanda Ancam Tarik Pasukannya dari Sudan*,  
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=200&halaman=5>



aturan-aturan logis menjadi suatu bentuk pernyataan yang mampu menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Dengan mengaplikasikan teori ilmu hubungan internasional penulis berusaha memberi penjelasan mengenai topik yang diangkat yaitu mengenai konsep manajemen konflik secara langsung dan penahanan konflik.

### **1. Manajemen Konflik Secara Langsung**

Manajemen konflik umumnya menjadi cara pengelolaan dan penanganan konflik, namun sebelumnya perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai definisi konflik. Kenneth Boulding (1962) mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi persaingan antar-pihak yang menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk tidak selaras dalam posisi masing-masing di masa depan dan masing-masing menginginkan untuk menguasai atau merebut posisi yang tak selaras dengan keinginan pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Pruitt&Rubin (1986) bahwa konflik adalah perbedaan kepentingan, atau keyakinan bahwa aspirasi para pihak yang ada saat itu tidak bisa dicapai secara bersamaan.<sup>11</sup>

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/ atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Adanya perbedaan pendapat dan kepentingan tersebut justru diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus maupun diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk keputusan politik yang merupakan

pembagian dan penjatahan nilai-nilai.<sup>12</sup> Konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam setiap masyarakat. Karena konflik merupakan gejala serba hadir maka ia tidak mungkin dihilangkan melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.<sup>13</sup>

Oleh karenanya untuk menangani konflik yang terjadi, diperlukan manajemen konflik. Manajemen konflik seringkali digunakan sebagai istilah generik untuk meliputi seluruh penanganan konflik secara positif.<sup>14</sup> Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Menurut Ross (1993), manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

---

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) hal.8

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.18

<sup>14</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal.30

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.<sup>15</sup>

Secara terminologis, manajemen konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>16</sup> Namun secara empiris, manajemen konflik sering didefinisikan sebagai kemampuan salah satu pihak yang memiliki otoritas dengan cara meningkatkan ancaman untuk menahan lawannya dari eskalasi dan untuk menghasilkan deeskalasi sesuai dengan kepentingannya.<sup>17</sup> Istilah manajemen konflik ini sering digunakan untuk merujuk pada pembatasan, pelonggaran dan isolasi konflik dengan kekerasan.<sup>18</sup>

Manajemen konflik itu sendiri lahir dari kesadaran bahwa konflik merupakan realitas sosial yang memang tak terbantahkan. Sebagai aspek intrinsik dari perubahan sosial itu sendiri. Sebagai realita sosial konflik mestinya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga konflik yang ada dapat dikembangkan dari kekawatiran akan terjadinya divergensi ke konvergensi. Artinya bagaimana

---

<sup>15</sup> Ardy Maulidy Navastara, *Manajemen Konflik : Definisi dan Teori-Teori Konflik*, <http://jepits.wordpress.com/2007/12/19/manajemen-konflik-definisi-dan-teori-teori-konflik/>, diakses 10 Maret 2011

<sup>16</sup> Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta, The British Council Indonesia, 2001) hal.7

<sup>17</sup> Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta, The British Council Indonesia, 2001) hal.1256

kita dapat memanfaatkan konflik bagi perkembangan kearah yang lebih baik ketimbang menimbulkan tindakan destruktif.<sup>19</sup>

Maka dalam menilai upaya manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Omar Hassan Bashir atas konflik Darfur dipakailah konsep manajemen konflik secara langsung. Manajemen konflik secara langsung sering diasumsikan sebagai upaya manajemen konflik yang dilakukan secara langsung oleh salah satu pihak yang memiliki otoritas dengan strategi-strategi yang dipersepsikan mampu mewujudkan kepentingannya. Konsep ini lebih jauh menjelaskan tentang beberapa kategori dan tindakan yang dapat digunakan dalam mengelola konflik. Adapun beberapa kategori dan tindakan yang dapat digunakan dalam mengelola konflik secara langsung diantaranya yaitu;<sup>20</sup> (1) Persiapan intervensi, (2) Meningkatkan kesadaran dan mobilisasi untuk mendukung perubahan, (3) Pencegahan, (4) Mempertahankan kehadiran dan (5) Memungkinkan suatu penyelesaian.

Untuk menganalisa kebijakan pemerintah Bashir maka lebih difokuskan pada kategori 'persiapan intervensi'. Kategori ini dianggap relevan karena dalam persiapan intervensi memiliki beberapa tahapan yang disebut pengidentifikasian dan perubahan pendekatan terhadap konflik. Dalam tahapan ini seorang pelaku manajemen konflik harus menyadari bahwa pelaku konflik dan runtutan waktu umumnya merupakan hasil dari ketegangan antar kepentingan untuk mendapatkan

---

<sup>19</sup> Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Msi, *Fenomena Multi Partai dan Kerawanan Konflik Lintas Agama Menjelang Pemilu Tahun 2009*, [http://www.yayasankorpribali.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=56:fenomena-multi-partai-dan-kerawanan-konflik-lintas-agama-menjelang-pemilu-tahun-2009&catid=37:artikel-dan-berita&Itemid=70](http://www.yayasankorpribali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56:fenomena-multi-partai-dan-kerawanan-konflik-lintas-agama-menjelang-pemilu-tahun-2009&catid=37:artikel-dan-berita&Itemid=70) diakses 10 Maret 2011

tujuan. Ada beberapa pendekatan dalam persiapan intervensi yang dapat dilakukan seorang pelaku manajemen konflik diantaranya :

- a. Pengendalian : strategi yang digunakan adalah dengan mengendalikan, menyaingi, menekan, memaksa dan bertempur. Ciri-cirinya dapat dilihat dari ketidaksabaran terhadap dialog dan pengumpulan informasi. Ada kecenderungan lebih suka pihak lain menolak atau mengalah.
- b. Penolakan : strateginya dengan menolak, melarikan diri, menyangkal, mengabaikan, menarik diri dan menunda. Ciri-cirinya adalah menolak masuk dalam dialog atau untuk mengumpulkan informasi. Kecenderungannya lebih suka pihak lain menolak.
- c. Kompromi : strateginya dilakukan dengan mengurangi harapan-harapan, tawar-menawar, memberi dan menerima, dan memecah perbedaan. Ciri-ciri lainnya adalah mencurigai tapi terbuka. Ada kecenderungan lebih suka pihak lain berkompromi atau mau berakomodasi.
- d. Akomodasi : strateginya dilakukan dengan setuju menentramkan, mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat dan menyerah. Ciri-cirinya terkait dengan informasi dan persetujuan pihak lain. Ada kecenderungan lebih suka pihak lain mengontrol.
- e. Pemecahan Masalah : strateginya dilakukan dengan pengumpulan informasi, dialog dan mencari alternatif. Ciri-cirinya adalah peduli tetapi berkomitmen untuk menyelesaikan. Ada kecenderungan lebih suka pihak lain memecahkan masalah atau kompromi

Konsep manajemen konflik secara langsung dipadukan dengan beberapa strategi yang diungkapkan oleh dua kelompok pemikir strategi manajemen konflik yaitu Chin dan Benne (1976) dan Ross (1993). Strategi dalam memecahkan konflik menurut Chin dan Benne (1976) adalah :<sup>21</sup>

- a. Strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa setiap orang akan mengikuti pemikiran yang rasional sehingga perubahan baik dalam individu maupun organisasinya dapat terjadi.
- b. Strategi normatif reduktif. Strategi ini tidak melupakan rasionalitas dan intelegensi manusia namun mempunyai asumsi bahwa pola tindakan dan kegiatan dipengaruhi oleh norma sosiokultural dan komitmen individu. Sehingga perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan pengetahuan, informasi atau rasionalitas intelektual saja namun juga perubahan perilaku, nilai-nilai, keahlian dan hubungan yang signifikan,
- c. Strategi *power coercive*. Penggunaan kekuatan dalam penyelesaian konflik baik dalam bentuk kekuatan politik maupun kekuatan lain sehingga akan terlihat jelas pihak-pihak yang mempunyai kekuatan dan yang tidak. Hal inilah yang akan menjadikan perubahan dalam pihak-pihak yang ada dalam konflik tersebut.

Sedang menurut Ross (1993) strategi dalam memecahkan konflik adalah *Self-help, Joint Problem Solving* dan *third-party decision making* .<sup>22</sup> Strategi

---

<sup>21</sup> John R. Minnery, *Conflict Management in Urban Planning* (Hampshire, Gower publishing Company Limited, 1986)

<sup>22</sup> Marc Howard Ross, *The Management of Conflict Interpretations and Interests in Comparative Perspectives* (Yale University Press, New Haven and London, 1999)

pertama, *Self-help* merupakan suatu tindakan sepihak yang bersifat deduktif. Tindakan ini kadang dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah. Strategi ini berupa tindakan konstruktif dalam bentuk menarik diri, menghindar, tidak mengikuti atau melakukan tindakan independen. Pihak yang lemah lebih tepat menggunakan strategi ini. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan strategi *self-help* antara lain : (i) *Exit*. Jika tekanan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah sangat kuat maka sebaiknya pihak yang lemah keluar dari tekanan itu, hal ini dikarenakan tekanan tersebut akan menimbulkan pengaruh kuat terhadap kehidupan pihak yang tertekan. (ii) *Avoidance*. Tindakan menghindar berdasarkan perhitungan untung-rugi dalam melakukan suatu aksi, terlebih apabila biaya yang dikeluarkan terlalu besar dari keuntungan yang didapat. (iii) *Noncompliance*. Digunakan untuk mencari dukungan atas tindakan sebagai akibat dari kewenangan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini dilakukan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi ini merupakan langkah awal *joint solving* atau *third-party decision making*. (iv) *Unilateral action*. Tindakan ini sangat memungkinkan kekerasan karena benturan kepentingan kedua pihak. Pihak yang melakukan ini menganggap apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingannya sedangkan pihak lain menilainya sebagai tindakan destruktif.

Strategi kedua, *Joint Problem Solving* merupakan strategi yang memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh pihak yang terlibat karena masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk berunding dan menentukan hasil akhir sesuai standar masing-masing. Sehingga

kesepakatan yang diambil memberikan keuntungan dengan kadar berbeda untuk tiap kelompoknya. Strategi ini membutuhkan penelusuran terhadap persoalan yang dihadapi dan bersifat integratif di mana dapat melibatkan berbagai isu. Langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini yaitu : (i) *Identification of interest*. Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam konflik yang sangat kompleks, di mana terkadang mengalami hambatan untuk mencari solusi apabila tidak ada pihak yang mampu menterjemahkan keluhan ke dalam permintaan konkrit pihak lain. (ii) *Weighting interest*. Setelah kepentingan teridentifikasi maka masing-masing pihak memberikan penilaian terhadap kepentingannya. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi terbuka dan kejujuran para pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan yang dihadapi masing-masing pihak. (iii) *Third-party assistance and support*. Pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi para pihak berkonflik, membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan ke dalam permintaan konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Di mana pihak ketiga ini harus netral agar para pihak berkonflik dapat menerima hasil yang disepakati. (iv) *Effective communication*. Pihak yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk mencapai solusi tetapi mereka harus berkomunikasi aktif agar diperoleh kesamaan definisi mengenai isu. (v) *Trust that an adversary will keep agreement*. Keputusan yang diambil harus dilakukan bersama pihak dan dibuat sah sebelum keputusan

dijalankan sehingga jika ada yang melanggar keputusan akan mendapat denda/sanki.

Strategi ketiga, *Third-party Decision Making*. Konflik yang dihadapi terkadang dipandang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat berdasarkan aturan-aturan untuk mencapai hasil yang pasti. Strategi ini sedikit menawarkan kompromi atau penyelesaian masalah secara kreatif karena pihak ketiga memiliki otoritas penuh.

Kebijakan manajemen konflik yang dilakukan pemerintah Omar Hassan Bashir dalam menyikapi konflik di Darfur pada awal munculnya lebih berkecenderungan menerapkan pendekatan manajemen konflik dengan pengendalian, menyaingi, menekan kelompok pemberontak dengan mempersenjatai dan mendukung kelompok milisi Arab bersenjata Janjaweed. Pendekatan dengan cara menunjukkan kekerasan ini masih dilakukan pemerintah Sudan hingga akhirnya konflik ini meletus pada 2003 dan menarik perhatian dunia internasional atas konflik internal di negara Sudan.

Namun seiring dengan masuknya intervensi asing ke Sudan, arah manajemen konflik Darfur mulai mengalami perubahan. Pemerintah Sudan mulai mengurangi agresinya dan mulai mengurangi pemanfaatan milisi Janjaweed untuk mendukung upayanya meredam konflik. Dengan bantuan dari Uni Afrika sebagai organisasi sekawasan pemerintah Bashir mulai melakukan pendekatan kompromi dalam memajemen konflik Darfur. Pemerintah bersama-sama dengan kelompok

pemberontak Darfur membuka meja perundingan dan berbagai strategi

manajemen konflik diupayakan demi menyelesaikan konflik yang terlanjur meluas dan menarik banyak pihak di dalamnya.

## **2. Penahapan konflik**

Penahapan konflik adalah sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas konflik yang digambarkan dalam skala waktu tertentu. Tujuan dari alat bantu analisa konflik ini adalah untuk melihat tahap-tahap dari siklus peningkatan dan penurunan konflik, membahas pada tahap mana situasi sekarang berada, berusaha meramalkan pola-pola peningkatan intensitas konflik di masa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola itu terjadi, serta untuk mengidentifikasi periode waktu yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat bantu lain. Menurut Fisher terdapat lima tahap konflik yaitu :<sup>23</sup>

- a. **Prakonflik** : merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum (laten), meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/ atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
- b. **Konfrontasi** : pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang partisipasi atau keterlibatan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antar

kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.

- c. **Krisis** : merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/ atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak(-pihak) lainnya.
- d. **Akibat** : suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
- e. **Pascakonflik** : situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan

tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Sebagai alat bantu analisa konflik, penahapan konflik dapat memberi gambaran tentang kapan konflik Darfur mulai meletus, pada tahap mana konflik ini kian menegang dan akhirnya mulai menurun. Maka dengan melihat arah penahapan konflik penulis dapat menganalisa pendekatan dan strategi-strategi yang dilakukan pemerintah Bashir dalam memajemen konflik Darfur ini.

#### **F. Hipotesa**

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Sehingga berdasarkan atas latarbelakang masalah dan perumusan masalah yang kemudian dengan menggunakan kerangka dasar teori sebagai landasan dalam menganalisa suatu permasalahan, maka penulis menyimpulkan bahwa usaha manajemen konflik Darfur oleh pemerintah Omar Hassan Bashir dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat nasional dan internasional baik dalam setiap tahapan konfliknya.

#### **G. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini akan dibatasi jangka waktunya dari tahun 2003 sewaktu konflik ini mulai meletus sampai paska pemilu Sudan 2010 dengan menjabatnya kembali Presiden Omar Hassan Bashir

## **H. Metode Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu argumen yang akan dibuktikan melalui data-data empiris.

Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku literatur, surat kabar, majalah, jurnal, laporan tahunan, tabloid dan internet serta dari sumber-sumber lain yang relevan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

**Bab I** memuat tentang Alasan Penulisan Judul, Tujuan Penelitian, Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Batasan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** memuat penjelasan mengenai struktur Darfur di Sudan Barat pada masa pemerintahan Omar Hassan Bashir. Bab ini akan diawali dengan menjelaskan makna strategis kawasan Darfur baik secara geografis, sosial-budaya, maupun ekonomi, sejarah Darfur sebagai bagian dari Sudan. Kemudian memaparkan pemerintahan Omar Hassan Bashir serta hubungannya dengan

**Bab III** memuat penjelasan mengenai proses eskalasi konflik Darfur dari tahun 2003-2010. Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran konflik yang terjadi serta aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

**Bab IV** memuat analisa tentang usaha manajemen konflik Darfur oleh pemerintahan Omar Hassan Bashir di tingkat nasional dan internasional.

**Bab V** berisi kesimpulan atas tesis pembahasan